

TERORISME DAN KEAMANAN KOLEKTIF ASEAN

Oleh: Harits Dwi Wiratma¹ & Yoga Suharman²

Abstrak

Masalah terorisme adalah masalah yang signifikan setelah serangan World Trade Center pada 11 September 2012. Kasus ini mengancam negara-negara muslim di dunia. Meskipun begitu, ini tidak bisa menjadi dasar bahwa orang-orang Muslim di dunia adalah seorang teroris. Terorisme telah menjadi salah satu ancaman non-tradisional yang bisa membahayakan orang dalam skala besar. Oleh karena itu, persepsi pendekatan dan konsep keamanan non-tradisional menjadi salah satu cara yang akan digunakan dalam makalah ini. Untuk memandu jalannya penelitian ini, beberapa tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini telah dirumuskan. Tujuan tersebut adalah mengembangkan kajian akademik untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara, untuk menganalisis paradoks keamanan kolektif ASEAN dalam memerangi terorisme.

Kata-kata Kunci: terorisme, keamanan kolektif, teori persepsi, kebijakan, Asia Tenggara.

Abstract

Terrorism issues is significant problem after the World Trade Center attacks on Sept 11, 2012. This case become threaten to muslim countries in the world. But this can't be the basis that the people of the world's Muslim is a terrorist. Terrorism has become one of the non-traditional threats that could endanger other people on a large scale. Therefore, perceptions approaches and non-traditional security concept to be one way to be used in this paper. To guide the course of this research, several objectives that needs to be achieved in this study has been formulated. Those objectives are: develop an academic review of the challenges faced by countries in Southeast Asia, to analyze the paradox of ASEAN collective security in combating terrorism.

Keywords: terrorism, collective security, perception theory, policy, Southeast Asia

Pendahuluan

Peristiwa 9/11 di Amerika Serikat (AS) telah melahirkan tantangan-tantangan keamanan yang semakin ekstensif, baik secara global, regional dan nasional. Di kawasan Asia Tenggara, terorisme telah menjadi isu keamanan non-tradisional menambah kompleksitas wacana keamanan geopolitik dan pertimbangan kekuatan. Terorisme menjadi masalah individu dan kolektif sekaligus menambah beban persoalan diluar kemiskinan

dan pembangunan regional.

Munculnya ancaman terorisme di Asia Tenggara menjadikan kawasan ini tampak sebagai 'medan pertempuran kedua' (*second front*) setelah Timur Tengah. Ini didasarkan oleh dua alasan. *Pertama*, mayoritas penduduk di kawasan ini beragama Islam yang dicurigai Amerika Serikat sebagai rahim terorisme dan radikalisme. *Kedua*, di sebagian wilayah Asia Tenggara terdapat kelompok Islam sektarian yang berkarakter keras dalam menyampaikan

¹ Staff Pengajar Prodi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta

² Alumni S2 Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada

aspirasinya. Kelompok ini tersebar di wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina (Cipto, 2007: 237).

Persepsi eksternal terhadap Asia Tenggara tersebut menimbulkan respon yang beragam diantara negara-negara di kawasan ini. Negara-negara ASEAN dihadapkan pada tekanan eksternal dan situasi politik domestik yang membuat mereka perlu merumuskan kembali rangkaian kebijakan-kebijakan keamanan yang sejalan dengan semangat perang global melawan terorisme dengan mempertimbangkan proyek integrasi ASEAN. Ini mengindikasikan bahwa ada tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN.

Sebagian pelaku yang selama ini didakwa sebagai teroris juga berasal dari sebagian negara Asia Tenggara, seperti Thailand Selatan, Filipina, Malaysia dan Indonesia (Winarno, 2011: 173). Sekedar menyebut nama seperti Azahari, Noordin M. Top, Mukhlas, Amrozi, Umar Patek dan lainnya merupakan aktor yang berasal dari sejumlah negara tersebut dan terkait dengan jaringan Al-Qaeda. Adapun wilayah Mindanao di Filipina, Aceh dan Selatan Thailand merupakan lokasi yang menjadi tempat pelatihan para pelaku teror.

Anggota-anggota dari jaringan Jema'ah Islamiyah di Malaysia, yang memiliki pertalian dengan al-Qaeda berdasarkan pandangan intelijen turut berperan dalam membantu pembajakan pesawat pada peristiwa 9/11 dan

penyerangan terhadap orang-orang Barat di Bali pada tahun 2002 yang membunuh sebanyak 202 orang dan pada tahun 2005 sebanyak 20 orang. Kejadian-kejadian ini menciptakan kekhawatiran baru dunia Barat atas Asia Tenggara.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut, terorisme menjadi isu keamanan di Asia Tenggara dan kawasan ini masuk dalam radar kebijakan keamanan Amerika Serikat. Dengan beragam respon yang berbeda, negara-negara ASEAN melakukan pendekatan yang berbeda pula. Malaysia, Singapura dan Indonesia menerapkan strategi yang berbeda-beda dalam pemberantasan terorisme.

Perbedaan ini disebabkan oleh tiga hal, yakni diferensiasi sistem politik masing-masing negara, sistem undang-undang keamanan dalam negeri serta persepsi ancaman masing-masing negara. Dengan demikian, negara-negara ASEAN, baik individu maupun kolektif pada kenyataannya menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam mendukung pemberantasan terorisme global. Persoalannya adalah bagaimana bentuk tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam penanganan terorisme?

Pendekatan Teoritik

Barry Buzan mendefinisikan lima sektor utama yang dicakup dalam pengertian keamanan yakni; (1) *The military security* yang mencakup dua tingkat pengelolaan kapabilitas persenjataan negara baik secara

ofensif maupun defensif dan persepsi negara terhadap intensitas satu dengan yang lainnya; (2) *The political security* yang menaruh perhatian pada stabilitas organisasi negara, sistem ideologi yang memberi legitimasi kepada pemerintahan; (3) *The economic security* yang mencakup pada akses terhadap sumberdaya, keuangan dan pasar yang untuk menopang tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang akseptabel; (4) *Societal security* yang mencakup kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan adat; dan (5) *Environmental security* yang menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan baik secara lokal maupun global sebagai sebuah dukungan penting terhadap sistem tempat kehidupan manusia bergantung (Buzan, 1991).

Sementara itu, untuk menjawab tantangan dalam hal strategi kolektif, peneliti akan menganalisis berdasarkan persepsi masing-masing negara terhadap ancaman keamanan yang mereka hadapi, terutama dalam kaitannya dengan ancaman terorisme. Thomas Franck dan Edward Weisband misalnya menyatakan bahwa “cara dua negara saling melihat satu sama lain dan memandang persoalan seringkali menentukan cara mereka berinteraksi dan bekerjasama, baik secara bilateral maupun regional (Franck dan Weisband, dikutip Mas’oed, 1989: 19).

Bagaimana hubungan antara persepsi dan tantangan negara-negara ASEAN dalam

menangani masalah terorisme di kawasan? Persepsi pada dasarnya menjadi salah satu ukuran untuk mendefinisikan sesuatu kenyataan atau permasalahan yang terjadi (Mas’oed, 1989: 20), dimana persepsi ini akan mempengaruhi sebuah sikap atau perilaku negara, baik internasional dan regional. Persepsi menjadi unsur yang membedakan pendekatan keamanan yang diterapkan oleh negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya dalam memerangi terorisme. Di dalam melihat kasus terorisme ini, negara-negara di kawasan ini masih dihadapkan pada perbedaan persepsi ancaman terkait dengan terorisme.

Persepsi merupakan sistem keyakinan (*belief system*) yang membedakan karakter kebijakan tiap-tiap aktor negara di Asia Tenggara dalam menanggapi isu terorisme (Mas’oed, 1989: 20). Perbedaan persepsi dan sistem keyakinan dalam penanganan terorisme membuat kerumitan bagi negara di kawasan Asia Tenggara untuk merumuskan sudut pandang bersama.

Mendefinisikan Terorisme

Tidak ada satupun definisi tunggal tentang istilah terorisme yang berhasil disepakati oleh para ilmuwan. Rumusan ini sangat terkait rezim ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang sedang berlaku. Sebagai ilustrasi, sejak fenomena 9/11, Amerika Serikat misalnya cenderung mengaitkan terorisme identitas kelompok Islam, sementara

tidak menetapkan teror yang dilakukan oleh negara Israel (*state terrorism*). Terorisme sulit dirumuskan dalam definisi yang baku sebab banyak bentuk aksi teror yang dilakukan oleh selain kelompok Al-Qaeda, bahkan negara pun pernah melakukan teror kepada warga negara dan negara lain.

Der Derian misalnya memberikan gambaran tentang beragamnya bentuk-bentuk terorisme antara lain *narco-terrorism*, *mytho-terrorism*, *anarcho-terrorism*, *socio-terrorism*, *ethno-terrorism*, *anti-terrorism*, *cyber-terrorism*, *state terrorism*, *religious terrorism*, *anti-terrorism* dan *pure-terrorism* (Der Derian, 2009: 73-83). Hal ini mengilustrasikan bahwa persepsi terhadap terorisme sangat bergantung pada latar belakang dari pihak-pihak yang mendefinisikannya.

Sementara Amerika Serikat mengaitkan terorisme dengan identitas tertentu, sebut saja Islam. Laporan penelitian yang dilakukan oleh komisi 9/11 Amerika Serikat (AS) misalnya mengidentifikasi Islam sebagai basis ideologi perjuangan terorisme. Ini disebabkan karena Bin Laden adalah seorang tokoh yang berasal dari dunia Islam dan menggunakan konsep jihad lantas AS menciptakan generalisasi yang fatal bahwa Islam merupakan akar penyebab terorisme.

Demikian halnya dengan yang dilakukan oleh Osama Bin Laden dalam mendefinisikan terorisme. Osama memaknai terorisme pada perilaku dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel beserta sekutunya terhadap dunia Islam pada.

Tindakan militer AS terhadap rezim-rezim yang dianggap sebagai pendukung teroris, misalnya, Afganistan dan Irak merupakan aksi teror tersendiri bagi penduduk setempat.

Dengan melihat perbedaaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pertentangan dalam mendefinisikan terorisme sangatlah bergantung pada tiga hal, yakni kondisi, latar belakang dan kepentingan pihak-pihak yang memberi definisi. Wacana Islam dan terorisme juga berkaitan dengan kepentingan subjek-aktor untuk membentuk hubungan kekuasaan antara Islam dan Barat yang sebelumnya retak. Oleh karena itu, tidak ada satupun kesepakatan dalam mendefinisikan terorisme. Dan upaya mendefinisikan terorisme senantiasa bersifat subjektif. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bruce Hoffman bahwa, "*the decision to call somebody or label some organization "terrorist" becomes almost unavoidably subjective, depending largely on one sympathizes with or opposes the person/group/cause concerned* (Hoffman dikutip Robertson, 2007: 6).

Dalam sejarahnya, terorisme sebagaimana yang sempat dinyatakan oleh Der Derian tidak tunggal. Terorisme bukan hanya merupakan tindakan masyarakat sipil yang menentang kekuasaan politik, tetapi juga merepresentasi dalam tindakan negara (*state sponsored terrorism*). Sebagai contoh, rezim-rezim otoriter di Amerika Latin, Indonesia, dan bekas Uni Soviet menggunakan aksi-aksi kekerasan guna meneror kelompok oposisi, revisionis dan pembangkang.

kekerasan guna meneror kelompok oposisi, revisionis dan pembangkang.

Meskipun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan terorisme, peneliti dalam hal ini mengacu pada definisi PBB sebagai:

“Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group, or state actor, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby – in contrast to assassination – the direct targets of attacks are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat – and – violence – based communication processes between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought”.

Terorisme memiliki kompleksitas tersendiri, definisinya luas tetapi hampir berangkat dari titik yang sama, yakni penggunaan kekerasan. Kekerasan yang digunakan oleh kelompok teroris meliputi pembajakan, penculikan, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Menurut Kiras, rumitnya mendefinisikan terorisme disebabkan oleh banyak faktor. Sebagai contoh adalah gerakan rakyat Chechnya yang dimotivasi untuk melepaskan diri dari Federasi Rusia, menjadi bangsa merdeka, namun disisi lain gerakan tersebut juga dimotivasi oleh agama (Kiras, 2005: 480).

Meski terdapat ragam definisi dan

pengertian tentang terorisme, namun tren terorisme yang berkembang belakangan ini cenderung memiliki muatan politis. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Viotti dan Kauppi, *“terrorism, as politically motivated violence, aims at achieving a demoralizing effect on publics and governments”* (Viotti dan Kauppi, 2007: 276). Pertanyaan kemudian adalah bagaimana ASEAN mendefinisikan terorisme? Seperti halnya negara-negara Barat, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga tidak memiliki kesepakatan dalam mendefinisikan terorisme (Kumar Ramakrishna & See Seng Tan, 2003: 18).

Paradoks Keamanan Individu dan Kolektif ASEAN

Pada umumnya ada tiga asumsi dasar yang mempengaruhi pengambilan keputusan negara dalam aspek keamanan, yakni kepentingan negara secara individu (*state*) dan kepentingan kolektif antar negara serta kebutuhan rasa aman warga yang melintas batas antar negara. Menyeimbangkan kepentingan ketiganya menjadi tugas negara yang sangat sulit. Hal ini juga berlaku dalam kebijakan melawan terorisme. Model kebijakan yang ditempuh oleh masing-masing negara Asia Tenggara berbeda-beda sehingga sulit untuk merumuskan kebijakan bersama dalam melawan terorisme.

Persepsi ancaman yang berbeda diantara negara anggota ASEAN menjadikan kawasan ini masih rentan dalam konflik

kepentingan individu sementara kebutuhan kolektif juga sangat penting. Artinya negara-negara Asia Tenggara berbenturan dengan paradoks internal dan eksternal (*global structure*). Ontologi keamanan lebih banyak bermuara pada keamanan terhadap diri (*the self*) dari faktor eksternal (Steele, 2008: 148-150).

Sementara itu, keamanan kolektif melihat negara berdiri untuk tujuan bersama dan untuk menciptakan masa damai dan mengikuti semua aturan yang sama. Ini didasari oleh konsep keamanan ontologis yang berangkat dari titik identitas kolektif yang tidak lagi mengarah pada keamanan fisik kawasan tetapi pada aspek non material keamanan tentang bagaimana mempertahankan identitas kolektif bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Wacana terorisme di Asia Tenggara menciptakan tantangan tidak hanya bagi negara-negara ASEAN secara individu, tetapi juga secara kolektif. Setidaknya ada lima hal yang menjadi tantangan ASEAN secara kolektif dalam mendukung perang global melawan terorisme. Analisis terhadap lima tantangan ini didasarkan pada kondisi-kondisi yang berkembang dalam konstelasi politik internasional di Asia Tenggara.

Pertama, ASEAN dihadapkan pada tantangan untuk bagaimana mempersatukan kepentingan kawasan yang kompleks. Benturan kepentingan tradisional masih sering mewarnai bangsa ASEAN. Malaysia misalnya

sulit untuk mengganti atau merubah ISA lantaran undang-undang tersebut merupakan instrument terkuat untuk membendung terorisme.

Kedua, tantangan regional berikutnya adalah bagaimana merumuskan persepsi kolektif diantara negara-negara ASEAN. Indonesia, Singapura, Filipina dan Malaysia memiliki persepsi ancaman yang berbeda-beda. Singapura misalnya memandang dirinya sebagai negara-kota yang miskin sumber daya dan harus merinci bentuk-bentuk ancaman sehingga memberikan kemudahan bagi negara tersebut untuk melakukan antisipasi. Singapura lebih melihat ancaman justru dari perspektif tradisional geopolitik (ancaman Indonesia dan Malaysia) ketimbang ancaman terorisme. Bahkan Singapura melihat ancaman yang muncul dari dominasi etnis Melayu terhadap eksistensi ras keturunan Cina yang mayoritas di negara tersebut (Cipto, 2007: 134-135).

Negara lainnya adalah Filipina yang disibukkan dengan tiga masalah keamanan domestik dan internasional, yakni separatisme, terorisme dan konflik di Laut Cina Selatan. Negara ini dihadapkan pada posisi yang dilematis, yakni pilihan untuk harus memprioritaskan perang global melawan terorisme, menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan, dan terorisme di negaranya. Sementara itu Thailand dihadapkan pada tiga masalah sekaligus, yakni gejolak politik dalam negeri, masalah korupsi kepresidenan, dan pemberontakan Patani di Thailand Selatan. Konsekuensinya adalah membuat negara ini

tidak dapat fokus pada masalah terorisme.

Indonesia seperti halnya negara lain juga dihadapkan pada posisi dilematis. Tekanan internasional terhadap negara mayoritas berpenduduk Islam ini begitu kuat agar memperkuat penegakan hukum kontra-terorisme, sementara pada sisi lainnya harus menyelamatkan proses demokrasi yang sudah diperjuangkan sejak tahun 1998. Persepsi domestik dan tekanan eksternal menjadikan Indonesia berada dalam posisi yang dilematis.

Ketiga, negara-negara ASEAN juga dihadapkan tantangan untuk merumuskan strategi penanganan terorisme secara kolektif. Mobilitas terorisme yang tinggi hanya mungkin dicegah dan diselesaikan melalui pembentukan kerjasama dan strategi kolektif. Oleh karena itu, usaha untuk mendorong kerjasama pada tingkat regional ASEAN menjadi penting dan harus terus dilakukan (Winarno, 2011: 184). Namun, lagi-lagi kita perlu kembali pada realitas hubungan internasional di Asia Tenggara. Perbedaan persepsi ancaman menciptakan diferensiasi dalam merumuskan kerjasama dan strategi kolektif negara-negara ASEAN. Konsekuensinya adalah rumitnya mencapai kesepakatan kolektif tentang ancaman regional.

Keempat, bagaimana memperkuat hukum-hukum anti-terorisme yang dirancang secara proporsional yang dapat sejalan dengan proses demokratisasi kawasan. Negara-negara ASEAN dituntut untuk menghilangkan dimensi

kepentingan dan perbedaan persepsi dalam membuat dan mendukung penguatan hukum melawan terorisme tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan HAM serta norma-norma ASEAN.

Tantangan regionalisme terhadap perkembangan terorisme harus diatasi secara efektif karena hal ini berkaitan dengan pemeliharaan stabilitas kawasan dan cita-cita untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang bebas dari ancaman terorisme. Jika ASEAN ingin menjadikan kawasannya sebagai wilayah yang aman, maka diperlukan kebijakan kolektif untuk mematikan sel-sel berkembangnya jaringan terorisme di Asia Tenggara. Kerjasama keamanan yang telah ada perlu diefektifkan dan diperluas cakupannya pada ranah penanganan terorisme.

Meskipun telah ada bentuk deklarasi tentang Tindakan Bersama Melawan Terorisme Internasional, Rencana Aksi Melawan Terorisme, Pembentukan Task Force, Pertukaran Informasi Intelijen, Deklarasi kerjasama AS, Australia, Rusia – ASEAN, namun ini perlu diperkuat agar tidak hanya sebatas pada deklarasi yang secara hukum tidak berkekuatan tetap (*soft law*).

Sementara itu, ASEAN juga dihadapkan pada tantangan eksternal. Sebagai gambaran adalah ASEAN dituntut harus memperkuat kerjasama dengan AS sementara sebagian dari masyarakat dalam negeri menolak keterlibatan pemerintahannya lebih jauh. Tantangan untuk merumuskan aspirasi

domestik dan kepentingan internasional adalah persoalan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini.

Dengan melihat kondisi-kondisi demikian, maka negara-negara ASEAN secara kolektif dihadapkan dalam sebuah paradoks yang membuat proses penyeragaman persepsi ancaman menjadi berbeda-beda. Kondisi-kondisi tersebut menjadi tantangan regional yang membuat ASEAN harus merumuskan persepsi kolektif terhadap adanya ancaman terorisme yang menyebar di kawasan.

Kesimpulan

Penanganan terorisme saat ini memerlukan satu kesatuan persepsi dalam penanganannya. Dimana permasalahan terorisme tidak hanya permasalahan satu negara, melainkan melibatkan aspek global. Aspek global ini memiliki relevansi dengan sebuah nilai, aturan dan norma-norma yang telah dipahami sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan politik maupun keamanan suatu negara. Aksi-aksi terorisme yang terjadi pada beberapa tahun terakhir menjadi ancaman serius bagi negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim, khususnya wilayah Asia Tenggara yaitu Malaysia dan Indonesia.

Permasalahan kawasan menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangan dalam menghadapi ancaman keamanan non tradisional. Keamanan non tradisional ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kondisi sosial keamanan masyarakat. Untuk itu, di dalam penanganan permasalahan ini memerlukan sebuah mekanisme yang ditinjau dari sisi kebijakan internal maupun eksternal. Sehingga akan menjadikan satu persepsi antara satu negara dengan negara lain. Bahkan memberi persamaan paradigma kepada satu keanggotaan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani permasalahan terorisme di suatu negara.

Dalam melihat tantangan penanganan terorisme di Asia Tenggara meliputi tiga hal. *Pertama*, mengefektifkan kerjasama regional. *Kedua*, membangun kesepahaman wacana dan persepsi tentang ancaman non-tradisional secara regional (*regional collective security*). *Ketiga*, memperkuat landasan hukum yang proporsional yakni, mendukung penanganan terorisme global tanpa mengabaikan hak dan kebebasan masyarakat sipil. *Keempat*, memperkuat identitas kolektif bangsa ASEAN dari ancaman eksternal yang berupaya menghancurkan identitas "we ness" -bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

- Buzan, Bary. 1991. *People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War*. Lynne Rienner Publisher: Boulder
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Der Derian, James. 2009. *Critical Practices in International Theory: Selected Essays*, Routledge: London & New York
- Gunaratna, Rohan. 2006. "Terrorism in Southeast Asia: Threat and Response". *Center for Eurasian Policy Occasional Research Paper, Series II (Islamism in Southeast Asia), No. 1*
- Jemadu, Alexius. 2008. *Politik Global: Teori dan Praktek*. Graha Ilmu: Bandung
- Kiras, James D. 2005. "Terrorism and Globalization". Dalam John Baylis & Steve Smith (eds). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Third Edition, New York: Oxford University Press
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Ramakrishna, Kumar & See Seng Tan. 2003. *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. Institute of Defence and Strategic Studies. Nanyang Technological University: Singapore
- Robertson, Ann E. 2007. *Terrorism and Global Security*. New York: Fact on File, INC
- Steele, Brian J., *Ontological Security in International Relations*, Routledge, London & New York, 2008
- Vaughn, Bruce, Chanlett-Avery, et.al. 2008. *Terrorism in Southeast Asia*. Novinka Books: New York
- Vaughn, Bruce, Chanlett-Avery, Emma, Dolven, Ben (et.al). 2009. *Terrorism in Southeast Asia*. Congressional Research Service
- Viotti Paul R. dan Mark V. Kauppi. 2007. *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, Third Edition, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Centre for Academic Publishing Service: Jakarta